



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Jalan Berliku Kampung Bayam

Stefanus Ato

Rintik hujan di luar kantor Lurah Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (23/11/2022) malam, tak mampu mendinginkan suasana di aula kelurahan. Emosi sebagian warga meledak-ledak saat musyawarah malam itu berakhir tanpa kepastian.

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersama perwakilan Pemprov DKI kembali menggelar musyawarah bersama puluhan warga Kampung Bayam. Musyawarah ini upaya dialog dalam menyelesaikan polemik relokasi warga ke hunian Kampung Susun Bayam di dekat Stadion Internasional Jakarta (JIS).

Dialog malam itu berlangsung alot. Setiap kali ada warga berkesempatan berbicara, mereka berkali-kali bertanya tentang kepastian waktu relokasi ke kampung susun. Pertanyaan warga itu sering kali diakhiri dengan kata pasrah. Kampung Susun Bayam dibangun untuk siapa?

"Kami adalah sampah. Sebagian besar dari kami pemulung, semua bekerja serabutan. Kalau sistemnya bisnis, kami tidak mampu," kata salah satu warga.

Sejak tiga tahun lalu, warga Kampung Bayam tergusur dan dipaksa pindah dari kampung mereka setelah Pemprov DKI Jakarta mengubah wajah kampung itu menjadi sebuah megaproyek JIS. Proses pengusurani dan memindahkan

disepakati warga.

"Kami dapat uang kerahiman. Jumlahnya tidak seberapa, tidak cukup untuk bangun rumah," kata Purnomo (31), warga bekas gusuran Kampung Bayam.

Pemprov DKI saat itu berjanji pula membangun kembali hunian warga yang letaknya tak jauh dari JIS. Proses pembangunan itu pun selalu melibatkan warga. Mereka diminta turut memberi saran, masukan, bahkan menyumbang pemikiran tentang model hunian yang diinginkan warga. Luas unit, dapur, hingga letak kamar pun berkali-kali dibahas bersama warga. Tujuannya saat itu hanya satu, yakni agar warga nyaman tinggal saat hunian itu rampung dan ditempati warga.

"Itu proses yang makan waktu. Rapatnya berulang-ulang. Bayangkan, malam ini kami ke sini lagi, buang waktu, buang tenaga, buang uang. Hasilnya, kok, jadi begini," kata ayah satu anak itu.

Rapat pada Rabu malam yang seharusnya diikuti warga dengan wajah semringah justru berlangsung muram. Sebagian dari mereka bahkan sempat meledak-ledak kala pihak Jakpro dan Pemprov DKI tak bisa memberi kepastian biaya sewa dan kapan warga bisa menempati Kampung Susun Bayam.

Tarif Rp 1,5 juta

Menurut Ketua Kelompok Tani Warga Kampung Bayam Madani, M Fukrhon, sejak awal warga kooperatif. Saat itu, ketika Kampung Bayam bakal digusur, mereka suka-

rela memindahkan perabotan ke hunian sementara.

"Semestinya dalam tiga tahun ini sudah ada kepastian buat kami. Boleh, untuk perawatan dan sebagainya dengan nominal yang harus sepadan dengan kami. Ekonomi kami, harus diketahui jelas, ada pemulung, serabutan, sampai penganggur," kata Fukrhon seusai musyawarah.

Jakpro dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Fukrhon, apabila ingin ada biaya sewa untuk menempati Kampung Susun Bayam, warga seharusnya diberi tahu sejak awal. Namun, yang terjadi selama tiga tahun itu tak pernah ada pembicaraan mengenai biaya sewa.

Warga kaget ketika muncul biaya sewa saat Kampung Susun Bayam diresmikan dan siap ditempati. Warga diminta membayar sewa tiap unit Rp 1,5 juta per bulan. "Kami kaget. Bagaimana dengan kemampuan kami," katanya.

Jakpro klaim sepakat

Jakpro melalui siaran pers yang diterima *Kompas*, Kamis (24/11) pagi, menyebutkan, pertemuan di kantor Lurah Papanggo telah membuahkan kesepakatan. Jakpro berikhtisar agar warga Kampung Bayam dapat segera menghuni Kampung Susun Bayam.

"Jakpro mempercepat proses administrasi internal dan koordinasi bersama dinas terkait. Komunikasi dengan warga dilakukan secara intensif dan maraton," kata Vice President Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif.

Menurut Syachrial, dari musyawarah antara Jakpro, Pem-

prov DKI, dan warga calon penghuni, ada kesepakatan agar Kampung Susun Bayam segera ditempati setelah kontrak untuk masa transisi selama enam bulan ke depan ditandatangani calon penghuni. Proses penetapan pengelolaan akan didiskusikan dengan Pemprov selama dua hari ke depan. Diskusi ini bertujuan agar aturan penggunaan dan pengelolaan hunian mengikuti regulasi yang berlaku di DKI.

"Tahapan koordinasi yang perlu dilalui ini cukup panjang. Sambil menunggu proses transisi pengelolaan ke Pemprov DKI Jakarta, kami mengupayakan agar warga dapat segera menempati huniannya. Jumat (25/11), kami akan kembali bermusyawarah dengan calon penghuni untuk menginformasikan perkembangan akhir," katanya.

Debby Novita Andriani dari Biro Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saat bermusyawarah dengan warga di kantor Lurah Papanggo, Rabu malam, mengatakan, pengelolaan Kampung Susun Bayam sedang dalam proses untuk diserahkan Jakpro kepada Pemprov DKI. Penyerahan pengelolaan itu diklaim meringankan beban warga Kampung Bayam.

"Kami dari tim Pemprov DKI mencoba mengakomodasi permohonan Jakpro memfasilitasi pengelolaan ke depan," kata Debby.

Beda klaim Jakpro dan situasi dialog di Papanggo pada Rabu malam sepertinya menjadi sinyal bahwa jalan warga Kampung Bayam menghuni rusun masih berliku dan belum terlihat ujungnya.